



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 2 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagbka@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Nomor : 005 / / 413.022/2024

Lamongan, Februari 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pelaksanaan Penilaian
Risiko Tahun 2024 Bagian
Administrasi Pembangunan
Setda Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah

Kab. Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2024 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

GALIH YANUAR MEDI PRATAMA. SE..M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19800117 200312 1 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



Lamongan
Megilan



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

Laporan

Pelaksanaan

Penilaian Resiko

Tahun 2023

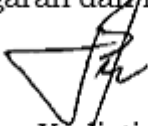
Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 2 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagbang@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	005 / / 413.034 / 2024
TANGGAL TERBIT	:	Februari 2024

Disiapkan Oleh	:	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan  Arga Yudistira, S.AP 19920707 202203 1 001
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program  Hariati S.Si., M.Si 19820906 200902 2 007
Disahkan Oleh	:	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  GALIH YANUAR MED PRATAMA, SE.,M.Si Pembina NIP. 19800117 200312 1 003

**Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian Administrasi Pembangunan mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Administrasi Pembangunan mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Administrasi Pembangunan demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Administrasi Pembangunan, selain itu Bagian Administrasi Pembangunan juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan.

Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Administrasi Pembangunan. Berdasarkan pemetaan tersebut diketahui bahwa Bagian Administrasi Pembangunan telah menyusun penilaian resiko, sehingga perlu segera disusun laporan penilaian risiko Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2024 untuk mempercepat implementasi monitoring dan evaluasi SPIP di Lingkup Bagian Administrasi Pembangunan pada khususnya dan Lingkup Sekretariat Daerah pada umumnya.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;

- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan kousioner yang dibuat dan disebar ke pejabat dan staf Bagian Administrasi Pembangunan bahwa persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Administrasi Pembangunan berjalan dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Jadi untuk pengendalian sangat kondusif sekali.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Karena dirasa kondisi pengendalian risiko sangat kondusif sekali, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian, Kerjasama berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik semakin mempermudah Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian Administrasi Pembangunan memiliki konteks strategis sebagai OPD yang berkonsentrasi pada penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, penetapan ini berdasarkan tusi yang diemban Bagian Administrasi Pembangunan yang bergerak didalam urusan KeSekertariatan Daerah.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko Bagian Administrasi Pembangunan, antara lain :

Tabel B.1 Indentifikasi Risiko Bagian Administrasi Pembangunan

No	Sebelum Evaluasi														Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungki	Nilai Resiko		
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A.	Tujuan														
	Terwujudnya Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersinergi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Rendah	RSO.22.01.01.64	Kabag Organisasi	Kurang kuatnya komitmen untuk mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerja	Eksternal	C	Pelayanan publik tidak berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	Masyarakat	2	2	4	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis, dll.	
1.	Sasaran Strategis														
	Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Pembangunan	Nilai IKM Setda	Nilai IKM Rendah	RSO.22.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	Informasi dan pengetahuan aparatur pada ketentuan/pedoman penyusunan dokumen yang berlaku belum merata	Eksternal	C	Nilai IKM menurun	Bagian Administrasi Pembangunan	2	2	4	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan	
2	Program Strategis														
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Pembangunan yang disusun sesuai ketentuan	Prosentase Rendah	ROO.22.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	Penyusunan kebijakan strategis bidang administrasi pembangunan yang belum sesuai ketentuan	Internal	C	Pelaksanaan perencanaan dan poembangunan dapat terhambat	Perangkat Daerah	2	2	4	a). Melakukan koordinasi dalam tim penyusun, OPD fasilitator, dan pihak lain yang terkait; b). Melakukan pendampingan terhadap OPD c). Melakukan Koordinasi Percepatan	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan rumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah bahan rumusan tidak mencapai target	ROO.22.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	Bahan rumusan yang disusun tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku	Internal	C	Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan dapat terhambat	Perangkat Daerah	2	2	4	a). Melakukan koordinasi dalam tim penyusun, OPD fasilitator, dan pihak lain yang terkait; b). Melakukan pendampingan terhadap OPD c). Melakukan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan d). Melakukan Koordinasi Percepatan Pelaporan Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan serta tindak lanjut.	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen administrasi pembangunan yang disusun tepat waktu	Dokumen disusun tidak tepat waktu	ROO.22.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	Dokumen disusun tidak bepedoman pada ketentuan yang berlaku dan tidak berkomitmen pada target yang telah ditetapkan	Internal	C	Terganggunya proses perencanaan dan penganggaran pembangunan	Perangkat Daerah	2	2	4	a). Melakukan koordinasi dalam tim penyusun dokumen ASB dan HSPK b). Sosialisasi Penyusunan ASB dan HSPK c). Melakukan koordinasi dengan OPD fasilitator d). Fasilitasi pendampingan OPD pengusul jenis ASB dan HSPK d). Koordinasi dan sosialisasi rancangan Perbup ASB dan HSPK	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase OPD yang update/input laporan RF sesuai ketentuan	Update/Input laporan RF tidak sesuai jadwal	ROO.22.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	OPD tidak disiplin dalam menyampaikan laporan RF setiap bulan	Eksternal	C	Terhambatnya pelaporan pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah	2	2	4	a). Menyiapkan data rekap proyek dalam satu tahun anggaran b). Pelaporan update realisasi fisik secara berkala c). Melakukan koordinasi	
		Persentase pengelola pembangunan yang mengikuti pembinaan dan pemantauan materi	Persentase rendah	ROO.22.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	Pemahaman yang tidak merata dari pelaksana pembangunan	Internal	C	Kurang meratanya pengetahuan pelaksana pembangunan	Perangkat Daerah	2	2	4	percepatan penyelesaian kegiatan/proyek	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang update/input TEPRA sesuai ketentuan	Update/Input laporan TEPRA tidak sesuai ketentuan	ROO.22.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	OPD tidak disiplin dalam menyampaikan laporan TEPRA setiap bulan	Eksternal	C	Terhambatnya pelaporan pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah	2	2	4	a). Melakukan monitor dan evaluasi laporan penyerapan anggaran seluruh OPD secara berkala b). Melakukan koordinasi dan sinkronisasi OPD dengan realisasi keuangan yang kecil	
		Persentase laporan realisasi keuangan yang dievaluasi	Persentase rendah	ROO.22.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	OPD tidak disiplin dalam menyampaikan laporan Realisasi Keuangan setiap bulan	Eksternal	C	Terhambatnya pelaporan pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah	2	2	4		

**Tabel C.1 Analisis Risiko Bagian Administrasi Pembangunan
Terlampir**

No	Setelah Evaluasi Triwulan													Rencana Tindak Pengendalian	Rata-rata Nilai Resiko		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Resiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Resiko Komposit
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena							
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
A.	Tujuan																
	Terwujudnya Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersinergi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Rendah	RSP.23.01.01.64	Kabag Organisasi	Kurang kuatnya komitmen untuk mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerja	Eksternal	C	Pelayanan publik tidak berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	Masyarakat	1	1	1	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis, dll.	0,063	0,08	0,01
1	Sasaran Strategis																
	Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Pembangunan	Nilai IKM Setda	Nilai IKM Rendah	RSO.23.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	Informasi dan pengetahuan aparatur pada ketentuan/pedoman penyusunan dokumen yang berlaku belum merata	Eksternal	C	Nilai IKM menurun	Bagian Administrasi Pembangunan	1	1	1	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk, Bimbingan Teknis, dll.	0,063	0,08	0,01
	Program Strategis																
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Pembangunan yang disusun sesuai ketentuan	Prosentase Rendah	RSO.23.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	Penyusunan kebijakan strategis bidang administrasi pembangunan yang belum sesuai ketentuan	Internal	C	Pelaksanaan perencanaan dan poembangunan dapat terhambat	Perangkat Daerah	2	1	2	a). Melakukan koordinasi dalam tim penyusun, OPD fasilitator, dan pihak lain b). Melakukan pendampingan terhadap OPD c). Melakukan Koordinasi Percepatan	0,13	0,08	0,01
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan rumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah bahan rumusan tidak mencapai target	RSO.23.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	-	Internal	C	Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan dapat terhambat	Perangkat Daerah	2	1	2	a). Melakukan koordinasi dalam tim penyusun, OPD fasilitator, dan pihak lain yang terkait; b). Melakukan pendampingan terhadap OPD c). Melakukan Koordinasi Percepatan d). Melakukan Koordinasi Percepatan Pelaporan Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan serta tindak lanjut.	0,13	0,08	0,00
														a). Melakukan koordinasi dalam tim penyusun dokumen ASB dan HSPK			
														b). Sosialisasi Penyusunan ASB dan HSPK			

	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen administrasi pembangunan yang disusun tepat waktu	Dokumen disusun tidak tepat waktu	RSO.23.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	Dokumen disusun tidak bepedoman pada ketentuan yang berlaku dan tidak berkomitmen pada target yang telah ditetapkan	Internal	C	Terganggunya proses perencanaan dan penganggaran pembangunan	Perangkat Daerah	2	2	4	c). Melakukan koordinasi dengan OPD fasilitator d). Fasilitasi pendampingan OPD pengusul jenis ASB dan HSPK	0,13	0,17	0,02
														e). Koordinasi dan sosialisasi rancangan Perbup ASB dan HSPK			
No	Setelah Evaluasi Triwulan I													Rencana Tindak Pengendalian	Rata-rata Nilai Resiko		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Resiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Resiko Komposit
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena							
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase OPD yang update/input laporan RF sesuai ketentuan	Update/Input laporan RF tidak sesuai jadwal	RSO.23.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	OPD tidak disiplin dalam menyampaikan laporan RF setiap bulan	Eksternal	C	Terhambatnya pelaporan pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah	2	1	2	a). Menyiapkan data rekap proyek dalam satu tahun anggaran b). Pelaporan update realisasi fisik secara berkala c). Melakukan koordinasi percepatan penyelesaian kegiatan/proyek	0,13	0,08	0,01
		Persentase pengelola pembangunan yang mengikuti pembinaan dan memahami materi pembinaan	Persentase rendah	RSO.23.01.01.64		pemahaman pelaksana pembangunan yang tidak merata	Internal	C	Kurang meratanya pengetahuan pelaksana pembangunan	Perangkat Daerah	2	1	2		0,13	0,08	0,01
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang update/input TEPPRA sesuai ketentuan	Update/Input laporan TEPPRA tidak sesuai ketentuan	RSO.23.01.01.64	Kabag Administrasi Pembangunan	OPD tidak disiplin dalam menyampaikan laporan TEPPRA setiap bulan	Eksternal	C	Terhambatnya pelaporan pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah	2	2	4	a). Melakukan monitor dan evaluasi laporan penyerapan anggaran seluruh OPD secara berkala b). Melakukan koordinasi dan sinkronisasi OPD dengan realisasi keuangan yang kecil	0,13	0,17	0,02
		Persentase laporan realisasi keuangan yang dievaluasi	Persentase rendah	RSO.23.01.01.64		OPD tidak disiplin dalam menyampaikan laporan Realisasi Keuangan setiap bulan	Eksternal	C	Terhambatnya pelaporan pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah	2	2	4		0,13	0,17	0,02

C. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan Bagian Administrasi Pembangunan, antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- b. Melaksanakan pembinaan SDM demi peningkatan kualitas SDM Bagian Administrasi Pembangunan
- c. Bekerjasama dengan Inspektorat terkait SPIP internal
- d. Melaksanakan desk atau asistensi terkait pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

D. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pentingnya dan masih sedikitnya sosialisasi terkait Mitigasi Risiko bisa mengakibatkan celah yang nantinya bisa membuat pengendalian risiko yang sudah baik menjadi kurang maksimal, dibutuhkan effort yang lebih keras lagi dari Inspektorat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi demi menyempurnakan pengendalian risiko di kabupaten Lamongan.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Bagian Administrasi Pembangunan, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:							
1	monitoring dan evaluasi secara berkala	Zoom. diskusi via WA, Rapat Koordinasi, Desk	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Penyusun Program Lingkup Setda	Januari - Desember 2024	Sudah terealisasi	0% resiko
Risiko Operasional OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:							
1	Monitoring dan evaluasi secara berkala	Zoom. diskusi via WA, Rapat Koordinasi, Desk, Sosialisasi	Bagian Administrasi Pembangunan, BPKAD, Bapelitbangda	Perangkat Daerah	Januari - Maret 2024	Sudah terealisasi	0 % resiko

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut ini merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko Bagian Administrasi Pembangunan, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yangDibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
Risiko Strategis OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:						
1	Monitoring dan evaluasiPelaksanaan Kegiatan Fisik secara berkala	Monitoring, evaluasi, koordinasi dan fasilitasi serta asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk,Bimbingan Teknis, dll.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Januari – Desember	Januari – Desember	Sisa Resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:						
1	Mengupayakan tersusunnya rumusandokumen kebijakan bidang administrasi pembangunan sesuai ketentuan	Melakukan koordinasi dalam tim penyusun, OPDfasilitator, dan pihak lain yang terkait;	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Januari – Mei	Januari – Mei	Sisa Resiko 0%
		Melakukan pendampingan pelaporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan terhadap OPD		April – Desember	April – Desember	Sisa Resiko 0%
		Melakukan Koordinasi Percepatan kegiatan		Agustus – Desember	Agustus – Desember	Sisa Resiko 0%

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada tahun 2023 , dapat simpulan bahwa potensi-potensi resiko yang terjadi di Bagian Administrasi Pembangunan dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar

menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi risiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian risiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian risiko.